

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN DEWAN DIREKSI)  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR  
YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HELISA NITA YARTI HUTAGALUNG  
NPM : 12 833 0101**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (KEPEMILIKAN  
INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT DAN DEWAN DIREKSI)  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA  
PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR  
YANG TERDAFTAR DI BURSA  
EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh :**

**HELISA NITA YARTI HUTAGALUNG  
NPM : 12 833 0101**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

Judul Skripsi : Pengaruh *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Dewan Direksi) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur Terdaftar Di BEI

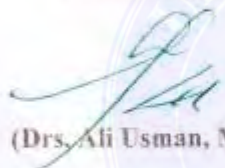
Nama Mahasiswa : HELISA NITA YARTI HUTAGALUNG

No. Stambuk : 12 833 0101

Jurusan : Akuntansi

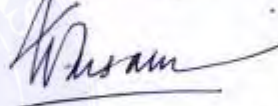
Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



(Drs. Ali Usman, MSi)

Pembimbing II



(Warsani Purnama Sari, SE, AK, CA, MM)

Mengetahui

Ketua Jurusan



( Ilham Ramadhan Nst, SE, M.Si, Ak )



(Drs. Nur Hafid, SE, M.Si)

Tanggal Lulus

2017

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap penghindaran perpajakan pada perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yaitu sebanyak 39 perusahaan, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria, maka diperoleh 13 perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang menjadi sampel penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS 24.0 (*Statistic Product and Services Solution*) *for windows* dan pengujian asumsi klasik. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Direksi, sementara Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, secara parsial variabel Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, secara parsial variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, secara simultan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci :Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Dewan Direksi dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).**

## ABSTRACT

This study aims to determine whether the institutional ownership, audit committee and board of directors have partial and simultaneous effect on tax avoidance in various manufacturing sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. This type of research is a causal associative. The population in this research is the sub-sector of various manufacturing industries that is as much as 39 companies, using sampling technique is purposive sampling selected based on the criteria, then obtained 13 companies sub sector miscellaneous manufacturing industries listed on Indonesia Stock Exchange period 2013-2015 which became sample research. The type of data used is quantitative data with the data source is secondary data. Data collection technique in this research is documentation technique. Data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis using SPSS 24.0 (Statistic Product and Services Solution) software for windows and classical assumption test. Independent variables used in this research are Institutional Ownership, Audit Committee and Board of Directors, while Tax evasion as a dependent variable. The results showed that partially Institutional Ownership variables have no significant effect on Tax evasion, partially the Audit Committee variables significantly influence tax avoidance, partially the Board of Directors has no significant effect on tax evasion simultaneously variable of institutional ownership, audit committee and board directors have no significant effect on tax evasion.

Keywords: Institutional Ownership, Audit Committee, Tax Avoidance Board.

## KATA PENGANTAR

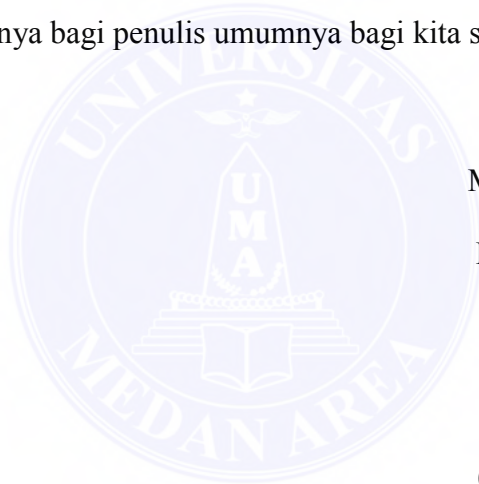
Puji syukur dan dengan kerendahan hati penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Dewan Direksi) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur Terdaftar Di BEI”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Levis Hutagalung dan Ibunda Hotmauli Marpaung atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi kasih sayang yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil serta abang, dan adik-adik tersayang, Jekson Hasiolan Hutagalung, Juleta Devi Hutagalung, Khris Fransisko Hutagalung, Tiara Putri Hutagalung yang tetap setia mendukung dan mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, M. A selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Efendi, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

4. Bapak Ilham Ramadhan Nst,SE,Ak,Msi,CA selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Drs. Ali Usman, MSi selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah memberikan banyak bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, AK, CA, MM selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak, MMA selaku Dosen Sekretaris yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sabahat-sahabatku, Imelda Yusnita Nadeak, Julianti Sirait, May Lestari, Febri Lamtaruli Sihalohe serta LANTAMA FC, Rika Pebryanti Siregar, Riki Tanando, Hermanto Hasibuan, Sri Muliani, Turisno Sihombing, Nur Ramadhana Tanjung, Wahyuni, Rumondang Manihuruk, Rangga Putra, Kiki Irma Yunita, Misriani. Terimakasih buat kasih sayang dan perhatiannya sebagai keluarga baru, kesuksesan menjadi milik kita semua, Amin. Tuhan Yesus Memberkati.
9. Seluruh keluarga besar yang saya banggakan, khususnya keluarga Tulang Jepri Marpaung, keluarga Bapak Gea, dan keluarga Amang Boru dari Jambi yang telah banyak memberikan semangat, dukungan, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis.

Penulis tidak dapat membalas pemberian dan bantuan yang sangat bernilai dari Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan keluarga serta pihak lain terutama dalam

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari kesempurnaan. Seperti kata pepatah “Tidak ada gading yang tidak retak”. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan kritik, dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Tuhan Yesus Kristus penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.



Medan, November 2017

Penulis,

**(Helisa Hutagalung)**  
**12.833.0101**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian, Jenis, Tarif dan Fungsi Pajak.....	6
B. Manajemen Perpajakan, Tujuan dan Motivasi Manajemen Pajak .....	9
C. Penghindaran Pajak .....	11
D. <i>Good Corporate Governance</i> , Teori Keagenan dan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	12
E. Pasar Modal .....	18
F. Pemegang Saham .....	19
G. Penelitian Terdahulu .....	30
H. Kerangka Konseptual.....	31
I. Hipotesis .....	32

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Populasi dan Sampel .....	35
C. Definisi Operasional Variabel .....	38
D. Jenis dan Sumber Data .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Uji Hipotesis .....	44

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil .....	46
B. Pembahasan .....	48

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1 : Jadwal penelitian .....	35
Tabel III.2 : Hasil Perhitungan Sampel .....	36
Tabel III.3 : Daftar Sampel Penelitian.....	37
Tabel III.4 : Koefisien Determinasi.....	44
Tabel IV.1 : Daftar Variabel Penelitian .....	47
Tabel IV.2 : Descriptive Statistics .....	50
Tabel IV.3 : Hasil Uji Normalitas.....	50
Tabel IV.4 : Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel IV.5 : Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	55
Tabel IV.6 : Hasil Uji Autokorelasi .....	57
Tabel IV.7 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	58
Tabel IV.8 : Hasil Uji Parsial.....	59
Tabel IV.9 : Hasil Uji simultan.....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Mekanisme Pengendalian <i>corporate governance</i> .....	26
Gambar II.2 : Kerangka Konseptual .....	32
Gambar IV.1 : Grafik Histogram .....	51
Gambar IV.2 : Grafik Normal Probability .....	51
Gambar IV.3 : Scatterplot .....	55



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan Negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam

transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

*Good Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *good corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *good corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup dalam praktek *good corporate governance*.

Pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan Institusional, komite audit dan dewan direksi) terhadap penghindaran pajak, adalah positif, jika perusahaan memiliki *Good Corporate Governance* yang baik akan menyajikan informasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu sehingga setiap informasi yang disampaikan oleh perusahaan khususnya laba, akan dipercaya oleh investor dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan kinerja keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan. Penerapan *GCG* dapat mengurangi risiko tindak manipulatif atas keputusan yang menguntungkan perusahaan dalam hal penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut “**Pengaruh *Good Corporate Governance***

**(Kepemilikan Institusional, Komite Audit dan Dewan Direksi) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

**“1. Apakah jumlah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?**

**2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?**

**3. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?**

**4. Apakah jumlah kepemilikan institusional, jumlah komite audit dan jumlah dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”.**

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti nyata (empiris) apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mendapatkan bukti nyata (empiris) apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mendapatkan bukti nyata (empiris) apakah dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mendapatkan bukti nyata (empiris) apakah kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Bagi Peneliti**, menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan peneliti mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Dewan Direksi) dalam melakukan penghindaran pajak yang



benar dan efisien yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri manufaktur di BEI.

**2. Bagi Perusahaan,** sebagai bahan masukan tentang kondisi penerapan Pengaruh *Good Corporate Governance* dalam melakukan penghindaran pajak dan hal-hal yang perlu dibenahi pada perusahaan industri manufaktur di BEI.

**3. Bagi Peneliti lain,** diharapkan dapat menjadi referensi informasi bagi pihak akademis secara umum dan secara khusus bagi pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian, Jenis, Tarif dan Fungsi Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Menurut Waluyo (2002), “ pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

##### **2. Jenis Pajak**

Menurut golongannya, pajak terdiri dari :

###### **a. Pajak langsung (*Direct Tax*)**

Pajak langsung, adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, surat ketetapan pajak memuat berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak tidak

langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu : Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

b. Pajak tidak langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung, adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak ini hanya bisa dikenakan, jika Wajib Pajak yang melakukan penjualan Barang mewah. Menurut sifatnya, pajak terdiri dari:

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya, dimana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar.  
Contoh: pajak penghasilan dan pajak kekayaan.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas objeknya.  
Contoh: pajak kekayaan, bea masuk, bea materai, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.

### 3. Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, karena adil dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak adalah tarif pajak yang harus dicantumkan dalam

undang-undang pajak. Besarnya tarif dalam undang-undang pajak tidak selalu ditunjukkan secara nilai presentase akan tetapi bisa dengan nilai nominal.

Menurut waluyo (2010) ada beberapa struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak antara lain:

1. Tarif Proposional atau Tarif Sebanding

Tarif proposional adalah tarif yang merupakan presentase yang tetap (tidak berubah-ubah) tanpa memperhatikan jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

2. Tarif pajak Progresif (Meningkat)

Tarif pajak progresif, yaitu suatu tarif yang persentasenya semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak, semakin lebih besar pula pajak yang terutang.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah tarif yang besaran persentasenya menurun bila semakin besar jumlah yang harus dikenakan pajak.

4. Tarif Pajak Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak.

#### 4. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama: fungsi *budgeter* (fungsi *financial*) dan fungsi *regulered* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi *Budgeter* atau fungsi *Financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Fungsi *Regulered*

Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

### c. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi adalah pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi Distribusi dibagi menjadi dua :

#### 1. Berdasarkan Sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya.

Misalnya; pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

#### 2. Berdasarkan wilayah

Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

## **B. Manajemen Perpajakan, Tujuan Dan Motivasi Manajemen Pajak**

### **1. Pengertian Manajemen Pajak**

Menurut Suandy (2008) menyatakan bahwa “Manajemen Pajak adalah perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya”. Menurut Pohan (2008), “Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan”.

## 2. Tujuan Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2008) menjelaskan secara umum tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang  
Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, antara lain:
  - a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
  - b. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

## 3. Motivasi Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2008) motivasi dilakukannya manajemen pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan  
Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Penerapan dan perlakuan yang berbeda atas dasar peraturan pemerintah terhadap masing-masing kondisi wajib pajak, membuat wajib pajak termotivasi untuk melakukan manajemen pajak.
2. Undang-Undang Perpajakan  
Dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), karena tidak ada undang-undang yang mengatur setiap masalah secara sempurna. Tidak jarang ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri, sehingga terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk manajemen pajak yang baik.
3. Administrasi Perpajakan  
Di Indonesia masih sangat sulit dalam pelaksanaannya karena wilayahnya yang luas dan jumlah penduduk yang banyak. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan manajemen pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak yang diakibatkan oleh

luasnya peratuarn perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang masih belum efektif.

### C. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Menurut Rego (2008) “Penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan”. Hanlon dan Heitzman (2010), “mengungkapkan bahwa tidak ada definisi penghindaran pajak yang diterima secara universal, setiap peneliti memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Secara umum penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaannya”. Menurut Pohan (2013, p.23), “penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang”.

Menurut Hoque, *et al.* (2011), beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak antara lain:

1. Menampakkkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional dan dibebankan terhadap laba bersih, sehingga dapat mengurangi utang pajak.

3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis untuk pengurang laba bersih.
4. Membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak.

Dalam teori agensi, adanya pemisahan kepemilikan dan manajemen mengindikasikan keputusan pajak perusahaan dapat memicu konflik agensi antara kepentingan pribadi manajemen dan pemegang saham. Manajer sebagai agen, dapat memanipulasi laporan dalam aktivitas penghindaran pajak yang memberikan informasi keliru bagi investor. Manajer ini dapat membenarkan aktivitas ini dengan mengatakan ketidaktahuan dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas penghindaran pajak oleh pemeriksa pajak atau fiskus (Chasbiandani dan Martani, 2012).

#### **D. *Good Corporate Governance*, Teori Keagenan dan Prinsip *Good Corporate Governance***

##### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan *GCG* pada BUMN menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah “suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berdasarkan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta



memperhatikan *stakeholder* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

*Good Corporate Governance (GCG)* secara umum adalah seperangkat mekanisme yang saling menyeimbangkan antara tindakan maupun pilihan manajer dengan kepentingan *shareholders* (Susanti, 2011). Mekanisme *GCG* terdiri dari mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, pertemuan *board of director* (Sutaryo dan Wibawa, 2011), kepemilikan manajerial, kompensasi eksekutif, serta komite audit (Prajitno dan Christiawan, 2013), mekanisme eksternal meliputi pengendalian oleh pasar, *level debt financing*, dan auditor eksternal (Sutaryo dan Wibawa, 2011), mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti kualitas audit eksternal (Sutaryo dan Wibawa, 2011), peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor), *monitoring debtholder*, dan kepemilikan pihak luar seperti kepemilikan institusional (Prajitno dan Christiawan, 2013).

Definisi *Good Corporate Governance* menurut *Organization for economic Cooperation and Development (OECD, 2004)*, yang mendefinisikannya sebagai system yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Good Corporate Governance* mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan

terhadap suatu perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, manajer, dan semua anggota *stakeholders* non pemegang saham. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2004), *good corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* pada intinya adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi agar kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan dalam manajemen perusahaan. Selain itu juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan.

Teori-teori yang berhubungan dengan *good corporate governance* diantaranya ada dua, yang pertama adalah *agency theory* yang menjelaskan

tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen).

Dalam *agency theory* ada beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar yaitu:

1. *Agency Conflict* yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang perusahaan.
2. *Agency problem* yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.

Kedua, *stewardship theory* merupakan harmonisasi antara pemilik modal (*principles*) dengan pengelola modal (*steward*) dalam mencapai tujuan bersama tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah dasar kepemimpinan dan hubungan antara *shareholder* dengan manajemen, atau bisa jadi antara *top management* dengan jajaran manajemen lain di bawahnya dalam sebuah organisasi perusahaan. *Stewardship theory* dapat dibangun diatas filosofi mengenai sifat dasar manusia bahwa hakekatnya manusia itu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain.

## 2. Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. *Teori agency* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

## 3. Prinsip *Good Corporate Governance*

### a. *Transparancy* (Transparansi)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

d. *Independensi* (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *GCG*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak-hak para pemegang saham;
- b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;
- c. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stekeholders*) dalam *corporate governance*;
- d. Transparansi dan penjelasan;
- e. Peranan dewan komisaris.

## **E. Pasar Modal**

Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan bagi kegiatan berinvestasi. Dengan adanya pasar modal aktivitas perekonomian dapat meningkat, karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas.

### **1. Pengertian pasar modal**

Menurut Fahmi dan Hadi (2011:41): “Tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham (*stock*) dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau memperkuat dana perusahaan”. Menurut Latumaerissa (2011:353): “Pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang relatif panjang, yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi dan akhirnya meningkatkan kegiatan perekonomian”.

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat yang menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi dengan jangka yang relatif panjang yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan dana bagi perusahaan.

## 2. Fungsi pasar modal

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:2), adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan indikator utama (*lending indicator*) bagi tren ekonomi negara.
- d. Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga lapisan masyarakat menengah.
- e. Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan *profesionalisme* serta penciptaan iklim berusaha yang sehat.
- f. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik.
- g. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
- h. Menjadi alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas dan diversifikasi.
- i. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.
- j. Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan dan pemanfaatan manajemen *profesional*. Jadi, dengan kata lain pasar modal merupakan hubungan *financial* yang diciptakan oleh institusi-institusi dan ketentuan-ketentuan yang mempertemukan pihak-pihak yang berlebihan dana atau surplus dana (*supplier of funds*) jangka panjang dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*demanders of funds*) untuk melakukan transaksi.

## F. Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menawarkan saham kepada masyarakat melalui pasar modal untuk memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Adapun saham yang diterbitkan perusahaan tersebut berbentuk selebar kertas yang menerangkan

bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan, sehingga dengan diterbitkannya saham di pasar modal, kebutuhan dana jangka panjang perusahaan dapat terpenuhi. Selain itu para pemilik saham dapat menikmati keuntungan baik berupa *capital, gain, dividen*, maupun *earning per share* yang akan dibagikan sesuai dengan besarnya penyertaan saham didalam perusahaan. Tanggung jawab pemegang saham ditentukan oleh seberapa besar penyertaan saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dengan demikian pemegang saham mempunyai hak memilih untuk setiap keputusan-keputusan yang memerlukan pemungutan suara didalam Rapat umum Pemegang Saham.

### **1. Pengertian Saham**

Saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau bisa yang disebut emiten. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka investor menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Menurut Rusdin (2008:68): “Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan”. Menurut Mishkin and Eakins (2009:28), saham adalah keamanan yang klaim atas pendapatan dari aset suatu perusahaan. Jadi saham adalah surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, saham dapat pula dikatakan sebagai tanda penyertaan modal.



Imbalan atas modal yang disertakan pada perusahaan tersebut, investor berhak atas dividen atau lainnya dengan jumlah yang sesuai dengan modal yang disetor pada perusahaan.

Menurut Darmadji dan Fakhrudin (2012:7), ada beberapa karakteristik yuridis bagi pemegang saham antara lain:

1. *Limited Risk*, yaitu pemegang saham hanya bertanggung jawab sampai jumlah yang disetorkan ke dalam perusahaan.
2. *Ultimate Claim*, yaitu para pemegang saham akan menentukan arah tujuan perusahaan.
3. *Residual Claim*, yaitu pemegang saham merupakan pihak terakhir yang mendapatkan pembagian hasil usaha perusahaan dan sisa aset dalam proses likuidasi perusahaan.

## 2. Struktur Kepemilikan

Menurut Sugiarto (2009:59): “Struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan saham yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Dengan kata lain, struktur kepemilikan saham adalah jumlah kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen dalam kepemilikan saham perusahaan dalam menjalankan kegiatannya suatu perusahaan diwakili oleh direksi (*agents*) yang ditunjuk oleh pemegang saham (*principles*)”. Menurut I Made Sudana (2011:11): “Struktur kepemilikan merupakan pemisahan antara pemilik perusahaan dan manajer perusahaan. Pemilik atau pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam perusahaan, sedangkan

manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan, dengan harapan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”. Adapun jenis-jenis struktur kepemilikan menurut Melinda (2008), dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik.

a. Kepemilikan Institusional

Menurut Fazlzadeh (2011): “Konsep struktur kepemilikan adalah subjek yang penting dalam konsep luas *good corporate governance*”. Hubungan antara struktur kepemilikan dan kinerja telah menjadi subjek perdebatan penting dan berkelanjutan dalam literatur keuangan perusahaan (Uwuigbe dan Olusanmi, 2012). Kepemilikan Intitusional adalah presentase saham yang dimiliki oleh investor institusi seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank (Moradi, 2012). Investor institusional dapat berperan dalam memonitor agen (manajer) perusahaan. Selain itu, investor institusional memiliki akses informasi yang lebih baik karena aktivitas investasi mereka, yang berarti pengetahuan yang lebih baik tentang kinerja perusahaan (Ellili, 2011). Menurut Navissi dan Naiker (2006) prediksi bahwa investor institusional yang besar memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut muncul dari asumsi bahwa investor tersebut memiliki insentif dan dapat memonitor manajemen secara efisien. Menurut Saputra (2010), banyak institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan publik sehingga manajer dapat mengambil

keputusan yang lebih leluasa di dalam pengelolaan manajemen perusahaan.

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Menurut Melinda (2008), menyatakan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan manajemen pada perusahaan akan dapat menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham sehingga keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Sedangkan menurut Faizal (2011): “Kepemilikan manajerial merupakan tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh jumlah saham yang dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam % (persen)”. Jadi, kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer yang dinyatakan dalam %, sehingga manajer sekaligus sebagai pemegang saham.

c. Kepemilikan Publik

Kepemilikan publik merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar (*outsider ownership*). Tujuan perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaan maka diperlukan pendanaan yang

diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Sumber pendanaan eksternal diperoleh dari saham masyarakat (publik). Menurut Wijayanti (2009:20): “Kepemilikan publik adalah jumlah saham atau jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Menurut Febriantina (2010), “Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar”. Jadi dari kutipan diatas kepemilikan publik merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak masyarakat yang dihitung dalam persentase.

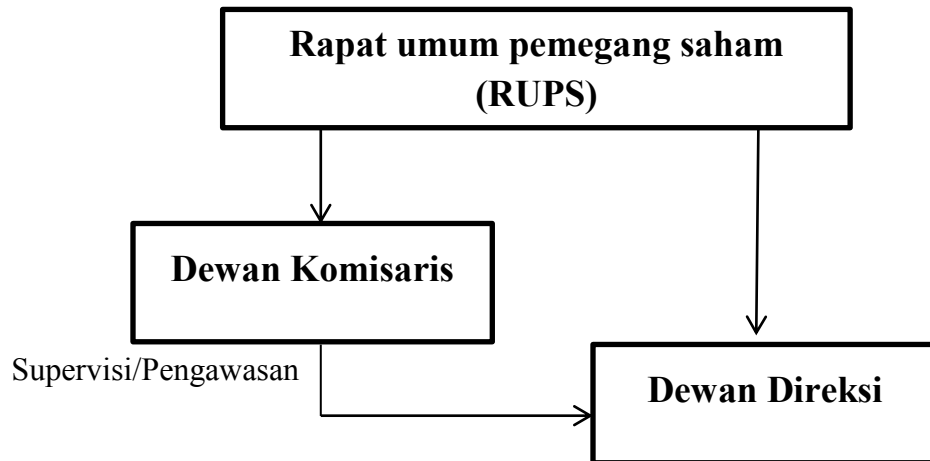
### **3. Dewan Komisaris**

Komisaris independen juga dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manajer. Dewan komisaris adalah inti dari *GCG* yang bertugas untuk menjamin strategi perusahaan, melakukan pengawasan terhadap manajer, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam perusahaan (Purwaningtyas, 2011). Carningsih (2010) menyatakan bahwa adanya penambahan anggota dewan komisaris independen dalam perusahaan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena penambahan anggota dimungkinkan hanya sekedar untuk memenuhi aturan.

Dewan komisaris dapat membentuk komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan *monitoring* terhadap proses pelaporan keuangan. Selain pengawasan terhadap laporan keuangan, komite audit juga

berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal perusahaan. Adanya pengawasan ini akan memastikan pencapaian kinerja perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan (Chan dan Li, 2008). Dewan komisaris mengarahkan dan mengawasi dewan direksi dalam mengelola dan mewakili perusahaan. Anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh komisaris, sedangkan anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dengan demikian, dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Menurut Egon Zehnder *International* dalam Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (2007): “Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan demikian, dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

**Gambar II.1**  
Mekanisme pengendalian *corporate governance*



Sumber : Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (2007)

#### 4. Dewan Direksi

##### a. Definisi dewan direksi

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan komisaris akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen dapat berkurang. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

##### b. Pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi

Direktur diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk

dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang untuk mengusulkan direktur.

**c. Tugas dan kewenangan dewan direksi**

Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain:

a. Eksternal

1. Mewakili perseroan atas nama perseroan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan lain.
2. Mewakili perseroan dalam perkara pengadilan.

b. Internal

1. Mengurus dan mengelola perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang tepat (keahlian, peluang, dan kelaziman usaha) yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
4. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
5. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
6. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

#### **d. Tanggung jawab dewan direksi**

Direktur bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Apabila kerugian perseroan disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan perseroan serta UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian perseroan.

### **5. Komite Audit**

#### **a. Definisi komite audit**

Komite audit adalah sebuah komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Surya, 2008).

Komite audit bertugas membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang



yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedangkan anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua. Jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam mengambil keputusan (Martina, 2009). Komite audit biasanya perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

#### **b. Tanggung jawab komite audit**

Menurut Surya (2008), pada umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang antara lain:

##### a. Laporan Keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan.

##### b. Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta etika melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

##### c. Pengawasan Perusahaan (*corporate control*)

Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

#### **c. Wewenang komite audit**

Wewenang komite audit menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (2007), meliputi:

1. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan.

3. Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang independen apabila dipandang perlu.
4. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai apabila dianggap perlu.

## G. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti Dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmi Fadhilah (2014)	Pengaruh <i>good corporate governance</i> terhadap penghindaran pajak	Variabel Dependen: penghindaran pajak (ETR). Variabel Independen: kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , jumlah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Maria Meilinda (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Pajak	Variabel independen: jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen, kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi. Variabel dependen: manajemen pajak ( <i>CETR</i> ).	Dewan komisaris dan kompensasi memiliki pengaruh positif terhadap <i>CETR</i> dan <i>GETR</i> . Presentase komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap <i>CETR</i> .
3	Azwar Hanas (2009)	Pengaruh Dewan Komisaris,	Variabel independen: presentase dewan	Presentase dewan komisaris independen, jumlah komite audit,

		Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap Good Corporate Governance	komisaris independen, jumlah dewan direksi, dan jumlah komite audit. Variabel dependen: <i>Corporate Governance</i> .	dan jumlah dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>corporate governance</i> .
4	Chen et al (2013)	<i>Tax Avoidance And Firm Value: evidence from china</i>	Variabel independen: <i>tax avoidance</i> . Variabel dependen: <i>agency cost</i> , nilai perusahaan. variabel kontrol : <i>leverage</i> . variabel moderating: transparansi.	Transparansi dapat mengurangi pengaruh negatif dari perilaku penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan.

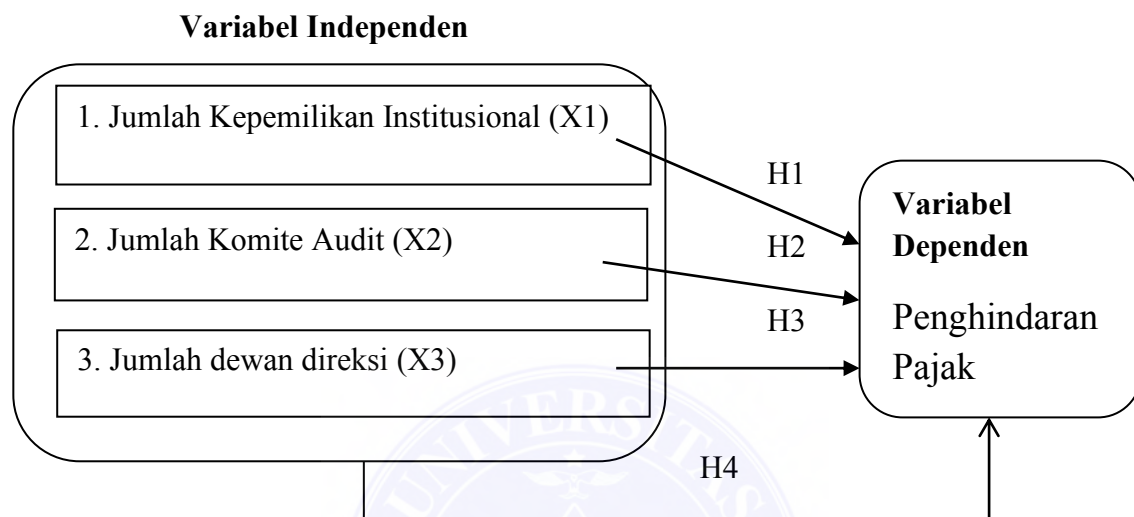
Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah:

1. Peneliti terdahulu meneliti pada perusahaan manufaktur di bidang sektor makanan dan minuman serta di bidang sektor perbankan, sedangkan peneliti saat ini meneliti pada perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur dengan sektor otomotif dan komponen, mesin, dan alat berat, tekstil dan garment, alas kaki, kabel, dan elektronika.
2. Dalam penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis *multiple regression*, sedangkan peneliti saat ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS versi 24.0.

#### H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independennya

adalah kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi. Sedangkan variabel dependennya adalah penghindaran pajak. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar II.2**  
**Kerangka Konseptual**

## I. Hipotesis

Menurut sugiyono (2008:93), “hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan”.

Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1$  : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

H<sub>2</sub> : Komite audit berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub> : Dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

H<sub>4</sub> : Kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi berpengaruh  
Secara simultan terhadap penghindaran pajak.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2007:30), “Penelitian asosiatif kausal adalah suatu penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dengan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)”. Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan direksi terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan direksi merupakan variabel yang mempengaruhi, sementara penghindaran pajak merupakan variabel yang dipengaruhi.

#### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana data tersebut dapat diakses melalui website <http://www.idx.co.id>, Jakarta Pusat.

#### **3. Waktu Penelitian**

Adapun penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2016			2017		
		Okt	Nov	Des	Jan <sup>s/d</sup> Mei	Juni <sup>s/d</sup> Oktober	Sept <sup>s/d</sup> Oktober
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal	■	■				
3	Bimbingan Proposal		■	■			
4	Seminar Proposal			■			
5	Pengumpulan Data			■	■		
6	Pengolahan Data				■	■	
7	Bimbingan Skripsi				■	■	■
8	Seminar hasil						■
9	Sidang Meja Hijau						■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Sub Sektor Aneka Industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015 yaitu sebanyak 39 perusahaan.

### 2. Sampel

Menurut Sugiyono (2008:116): “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,

2008:122). Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015.
- b. Perusahaan yang memiliki data kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi selama periode 2013-2015.
- c. Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang dipublikasikan pada periode 2013-2015 dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- d. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan sudah di audit.
- e. Perusahaan yang memiliki laba bersih selama periode 2013-2015.

**Tabel III. 2**  
**Hasil Perhitungan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2015.	<b>39</b>
2	Jumlah perusahaan yang tidak memiliki data lengkap sesuai variabel selama periode 2013-2015.	(3)
3	Jumlah perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah selama periode 2013-2015.	(8)
4	Jumlah perusahaan yang tidak memiliki laba bersih selama periode 2013-2015	(15)
	<b>JUMLAH SAMPEL</b>	<b>13</b>
	Total : Jumlah pengamatan penelitian 3 tahun dikalikan dengan jumlah sampel.	39

Sumber : Diolah Peneliti ( 2016 )



Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diatas, maka diperoleh perusahaan yang menjadi sampel berjumlah 13 perusahaan dari jumlah populasi sebanyak 39 perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Angka tahun pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 tahun berturut-turut mulai dari 2013, 2014, 2015.

**Tabel III.3**  
**Daftar Sampel Penelitian**  
**Perusahaan Aneka Industri**  
**Sub sektor : Mesin Dan Alat Berat, Otomotif Dan Komponen, Tekstil dan**  
**Garment, Alas Kaki, Kabel Serta Elektronika.**

No	Kode	Nama	Kriteria					Sampel
			1	2	3	4	5	
1	AMIN	Ateliers Mecaniques D'indonesia, Tbk	x	x	x	x	x	
2	KRAH	Grand Kartech, Tbk	√	x	√	√	√	
3	ASII	Astra Internasional, Tbk	√	√	√	√	√	1
4	AUTO	Astra Otoparts, Tbk	√	√	√	√	√	2
5	BOLT	Garuda Metalindo, Tbk	x	x	x	x	x	
6	BRAM	Indo Kordsa, Tbk *	√	√	x	√	√	
7	GDYR	Goodyear Indonesia, Tbk	√	√	x	√	x	
8	GJTL	Gajah Tunggal, Tbk	√	√	√	√	x	
9	IMAS	Indomobil Sukses Internasional, Tbk	√	√	√	√	x	
10	INDS	Indospring, Tbk	√	√	√	√	√	3
11	LPIN	Multi Prima Sejahtera, Tbk *	x	√	√	√	x	
12	MASA	Multistrada Arh Sarana, Tbk	√	√	x	√	x	
13	NIPS	Nippress, Tbk	√	√	√	√	√	4
14	PRAS	Prima Alloy Stell Universal, Tbk	√	√	√	√	√	5
15	SMSM	Selamat Sempurna, Tbk	√	√	√	√	√	6
16	ADMG	Polychem Indonesia, Tbk	√	√	x	√	x	
17	ARGO	Argo Pantes, Tbk	√	√	x	√	x	
18	ERTX	Eratex Djaya, Tbk	√	√	x	√	√	
19	ESTI	Ever Shine Tex, Tbk	√	√	x	√	x	
20	HDTX	Panasia Indo Resources, Tbk	√	x	√	√	x	
21	INDR	Indo Rama Synthetic, Tbk	√	√	x	√	x	
22	MYTX	Apac Citra Centertex, Tbk	√	√	√	√	x	
23	PBRX	Pan Brothers, Tbk	√	√	x	√	√	
24	POLY	Asia Pacific Fiber, Tbk	√	√	x	√	x	
25	RICY	Ricky Putra Globalindo, Tbk	√	√	√	√	√	7
26	SRIL	Sri Rejeki Isman, Tbk	√	√	x	√	√	

27	SSTM	Sunson Textile Manufacturer, Tbk	√	√	√	√	x	
28	TFCO	Tifico Fiber Indonesia, Tbk	√	√	x	√	x	
29	TRIS	Trisula Internasional, Tbk	√	√	√	√	√	8
30	UNIT	Nusantara Inti Corpora, Tbk	√	√	√	√	√	9
31	BATA	Sepatu Bata, Tbk	√	√	√	√	√	10
32	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure, Tbk	x	x	√	√	x	
33	IKBI	Sumi Indo Kabel, Tbk	x	x	√	√	√	
34	JECC	Jemblo Cable Company, Tbk	√	x	√	√	√	
35	KBLI	Kmi Wire And Cable, Tbk	√	√	√	√	√	11
36	KBLM	Kabelindo Murni, Tbk	√	√	√	√	√	12
37	SCCO	Supreme Cable Manufacturing And Commerce, Tbk	√	√	√	√	√	13
38	VOKS	Voksel Electric, Tbk	√	x	√	√	x	
39	PTSN	Sat Nusa Persada, Tbk	√	√	x	√	x	

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) ( diolah peneliti 2017)

### C. Definisi Operasional Variabel

#### 1. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (*ETR*) setiap akhir tahun masing-masing perusahaan sektor aneka industri manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian dari 2013 – 2015. Tarif pajak efektif (*ETR*) dihitung dengan menggunakan cara membagi total beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak penghasilan.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel independen atau bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. X1 = Kepemilikan Institusional

Rasio ini menggunakan presentase (Khurana Dan Moser 2009). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$KI = \frac{\text{saham yang dimiliki intitusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

### b. X2 = Komite Audit

Dalam penelitian ini Komite Audit diukur dengan menggunakan jumlah Komite Audit dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

### c. X3 = Dewan Direksi

Ukuran dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi (Subramaniam, 2009).

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis- jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif adalah data yang

dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atau variabel yang diwakilinya.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain dan bukan diusahakan sendiri pengumpulannya. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan Sub sektor Aneka Industri manufaktur yang terdaftar di BEI dan dapat diakses dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau dari website masing-masing perusahaan. Laporan keuangan yang menjadi sumber adalah laporan keuangan perusahaan sub sektor aneka industri manufaktur dari tahun 2013 sampai dengan 2015.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mencatat data-data yang dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan tersebut diperoleh dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model analisis regresi berganda. Dalam analisis data, peneliti menggunakan program SPSS versi 24.0.

## 1. Analisis Regresi berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009):

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Dimana :

Y : Penghindaran pajak

$\alpha$  : konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  : Koefisien Regresi

$x_1$  : Kepemilikan institusional

$x_2$  : Ukuran komite audit

$x_3$  : Dewan direksi

e : Error (Tingkat Kesalahan)

## 2. Uji Asumsi klasik

Sebelum melakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik

menggunakan analisis statistik dengan program SPSS versi 24.0. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi :

a. Uji Normalitas

Menurut Priyatno (2014:163), “Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai yang terdistribusi secara normal”. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikan  $>0,05$  maka residual memiliki distribusi normal dan apabila nilai signifikan  $<0,05$  maka residual itu tidak memiliki distribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan (korelasi) antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat

grafik *scatter plot*. Menurut Priyatno (2014:166), dasar kriteria dalam pengambilan keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$ . Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtun waktu (*time series*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi diantaranya dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson (DW) adalah sebagai berikut:

1.  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
2.  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
3.  $DL < DW < DU$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

## G. Uji Hipotesis

Hasil uji regresi linier sederhana maupun uji regresi berganda terdiri dari beberapa hasil yang digunakan sebagai pengujian hipotesis antara lain sebagai berikut:

### 1. Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menguji seberapa besar kemampuan model regresi variabel independen (Kepemilikan institusional, Komite Audit dan Dewan Direksi ) dapat menjelaskan variabel dependen (Penghindaran Pajak). Menurut Priyatno (2013:100), pedoman dalam menginterpretasikan hasil koefisien determinasi yaitu:

**Tabel III.4**  
**Koefisien Determinasi**

No	Nilai Koefisien	Determinasi
1	0,00 - 0,199	sangat rendah
2	0,20 - 0,399	Rendah
3	0,40 - 0,599	Sedang
4	0,60 - 0,799	Kuat
5	0,80 - 1,000	sangat kuat

Sumber : Priyatno, 2013

### 2. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:



$H_0$  = tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

$H_1$  = semua variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0$  diterima  $H_1$  ditolak jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak  $H_1$  diterima jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

### 3. Uji Simultan (Uji F)

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji f. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

$H_0$  = tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen.

$H_1$  = semua variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan f hitung dengan f tabel dengan ketentuan sebagai berikut:

$H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika  $f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

$H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$  untuk  $\alpha = 5\%$

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, N.A., dan L. Kurniasih. 2012. *Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing* 8 (2): 95–189.
- Azwar Hanas, (2009). “Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dan Komite Audit Terhadap *Good Corporate Governance*”.
- Carningsih, 2010. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Hubungan Antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di bursa Efek Indonesia). Skripsi Universitas Gunadarma.
- Chan, Kam L and Jeane Li.2008. *Audit Committee and Firm Value: Evidence on Outside Top Executive as Experts-Independent Directors*. *Journal Compilation*, Blackwell Publishing. 16(1) :16-31.
- Chen, Shuping et.,al. (2008). *Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-Family Firms*. *Journal of Financial Economics*
- Darmadji, T dan Fakhrudin M.H. 2012. “Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab”. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, N.N., dan I.K. Jati. 2014. Pengaruh karakteristik eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia. *E-jurnal Akuntansi* 6 (2): 249–260.
- Ellili, Nejla Ould Daoud. 2011. *Ownership Structure, financial Policy and Performance of The Firm: US Evidence*. *International Journal of Business and Management*, 6(10): pp: 80-93.
- Fadhilah, Rahmi. 2014. “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Fahmi, Irham, dan Hadi. 2011. “Teori Portofolio dan Analisis Investasi”. Edisi Kedua. Bandung : Alfabeta.
- Faizal. 2011. “Aplikasi berbasis web dengan PHP dan MYSQL”. Yogyakarta: Penerbit Ram Media.
- Febriantina, D. 2010. “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Dan Kepemilikan Publik Terhadap Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan”. Skripsi. Surakarta : Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Fazlzadeh, Alireza., Ali Tahbaz Hendi and Kazen Mahboubi. 2011. *The Examination of the Effect of Ownership Structure on Firm Performance in Listed Firms of Tehran Stock Exchange Based on the Type of the Industry*. *International Journal of Business and Management*, 6(3), pp: 249-266.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanlon, Michelle and Heitzman, Shane.2010. “***A Review of Tax Research***”. *Journal of Accounting and Economic*” 50 (2010) 127-178.
- Hoque, Zahirul and Adams, Carol. 2011. *The Rise and Use of Balanced Scorecard Measures in Australian Government Departments*. *Financial Accountability of Management*. 27 (3). Pp 308-331
- Ilyas, Waluyo, Wirawan. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Edisi pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- I Made Sudana. 2011. “Manajemen Keuangan Perusahaan”. Erlangga, Jakarta.
- Imanta, Dea., dan R. Satwiko. 2011. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepemilikan Manajerial”. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.
- Khurana, I.K., dan W.J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. Diakses dari [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com).
- Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002.
- Kurniasih,T., dan M. Sari. 2013.“***Pengaruh ROA, leverage, Corporate Governance, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance***”. *Buletin Studi Ekonomi* 18 (1): 1–84.
- Latumaerissa, Julius. R, 2011. “Bank dan Lembaga Keuangan Lain”. Jakarta: Salemba Empat.
- Maharani, I.G., dan K.A. Suardana. 2014. Pengaruh *Corporate Governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi* 9 (2): 525 –539.
- Maria Meilinda (2013), “***Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak***”.
- Melinda, F.I dan Bertha S. Sutejo. 2008. “Interpedensi Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan”. *Journal Manajemen dan Bisnis*. Vol 7 No. 2.

- Miskhin, Frederick S dan Stanley G Eakins. 2009. "Financial Market and Institutions". Addition Wesley, 5<sup>th</sup> edition.
- Moradi, Nassim Shah., Mahmood Moein Aldin Forough Heyrani, dan Mohsen Iranmahd. 2012. *The Effect of Corporate Governance, Corporate Financing Decision and Ownership Structure on Firm Peformance: A Panel Data Approach from Tehran Stock Exchange*. International Journal of Economics and Finance, 4(6): pp: 86-93.
- Muhammad Oktofian, 2015. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
- Navissi, farshid dan Vic Naiker. 2006. *Institutional Ownership and Corporate Value*. Managerial finance, 32(3): pp: 247-256.
- Pohan, H. T. 2008. ***Pengaruh Good Corporate Governance, rasio Tobin Q, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik***. Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Prajitno, Bella Carlina dan Yulius Jogi Christiawan. 2013. Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Reputasi Kantor Akuntan Publik Terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Bussiness Accounting Review*, Vol.1.
- Purwaningtyas, Frysa Praditha. 2011. Analisis Pengaruh Mekanisme *Good Coorporate Governance* Terhadap Nilai perusahaan. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Priyatno, Duwi. 2013. **Mandiri Belajar SPSS untuk pemula**. Cetakan Pertama. Jakarta: Mediakom.
- Rego, S.O., dan R. Wilson. 2008. ***Executive Compensation, Tax Reporting Aggressiveness and Future Firm Performance***. Republik Indonesia, ***Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*** Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007", Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Rusdin. (2008). "Pasar Modal Cetakan Kedua". Bandung: Alfabeta.
- Saputra, Mulia. 2010. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1): h: 81-92.
- Suandy, Erly. 2008. ***Perencanaan Pajak***. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedua Belas, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Surya, Indra & Yustiavandana, Ivan. 2008. Penerapan *Good Corporate Governance* (Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha), Jakarta: Kencana.
- Susanti, Serli Ike Ari. 2011. Pengaruh Kualitas *Corporate Governance*, Kualitas Audit, dan *Earnings Management* Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 5(2): h:145-161
- Sutaryo dan Wibawa, Anas. 2011. *Monitoring Mechanism and created Shareholder Value Public Company* in Indonesia.
- Uwuigbe, Uwalomwa dan Olamide Olusanmi. 2012. *An Empirical Examination of the Relationship between Ownership Structure and the Peformance of Firms* in Nigeria. *International Business Research*, 5(1), pp:208-215.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2009 . Akuntansi Pajak . Jakarta . Penerbit : Salemba Empat
- Warsidi dan Pramuka, Bambang Agus. 2009, “**Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang**”, Artikel di internet, *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi*, Vol 2:1.
- Wijayanti, Ngestiana. 2009. “Pengaruh *Profitabilitas*, Umur Perusahaan, dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan”.

## Lampiran I

### Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ASII	Astra Internasional, Tbk
2	AUTO	Astra Otoparts, Tbk
3	INDS	Indospring, Tbk
4	NIPS	Nippres, Tbk
5	PRAS	Prima Aloy Stell Universal, Tbk
6	SMSM	Selamat Sempurna, Tbk
7	RICY	Ricky Putra Globalindo, Tbk
8	TRIS	Trisula Internasional, Tbk
9	UNIT	Nusantara Inti Corpora, Tbk
10	RICY	Ricky Putra Globalindo, Tbk
11	KBLI	Kmi Wire and Cable, Tbk
12	KBLM	Kabelindo Murni, Tbk
13	SCCO	Supreme Cable Manufacturing And Commerce, Tbk

## Lampiran II

### Daftar Variabel Penelitian

No	Kode Perusahaan	Tahun	<i>Tax avoidance</i>	Kepamilikan Institusional	Komite Audit	Dewan Direksi
1	ASII	2013	0,189	1,482	4	7
		2014	0,191	1,482	4	8
		2015	0,204	1,482	4	9
2	AUTO	2013	0,166	2,593	3	8
		2014	0,136	2,074	3	8

		2015	0,255	2.074	3	7
3	INDS	2013	0,200	0,845	3	3
		2014	0,238	0,761	3	3
		2015	0,532	0.761	3	3
4	NIPS	2013	0,256	2.105	3	3
		2014	0,256	3.874	3	3
		2015	0,265	3.874	3	3
5	PRAS	2013	0,165	2.139	3	3
		2014	0,244	2.139	3	3
		2015	0,239	2.139	3	3
6	SMSM	2013	0,235	1.389	3	4
		2014	0,221	1.389	3	4
		2015	0,209	1,389	3	4
7	RICY	2013	0,351	1.795	3	3
		2014	0,332	1.795	3	3
		2015	0,393	1.795	3	3
8	TRIS	2013	0,247	2.792	3	3
		2014	0,245	2,682	3	2
		2015	0,253	2,678	3	2
9	UNIT	2013	0,871	1,374	4	2
		2014	0,961	1,374	4	2
		2015	0,767	1,374	4	2
10	BATA	2013	0,304	1,538	3	5
		2014	0,284	1,538	3	5
		2015	0,090	1,538	3	5
11	KBLI	2013	0,337	1,434	3	4
		2014	0,280	1,860	3	5
		2015	0,238	1,860	3	5
12	KBLM	2013	0,280	1,345	3	2
		2014	0,251	1,345	3	2

		2015	0,405	1,345	3	2
13	SCCO	2013	0,276	2,432	3	3
		2014	0,245	2,432	3	3
		2015	0,227	2,432	3	4

### Lampiran III

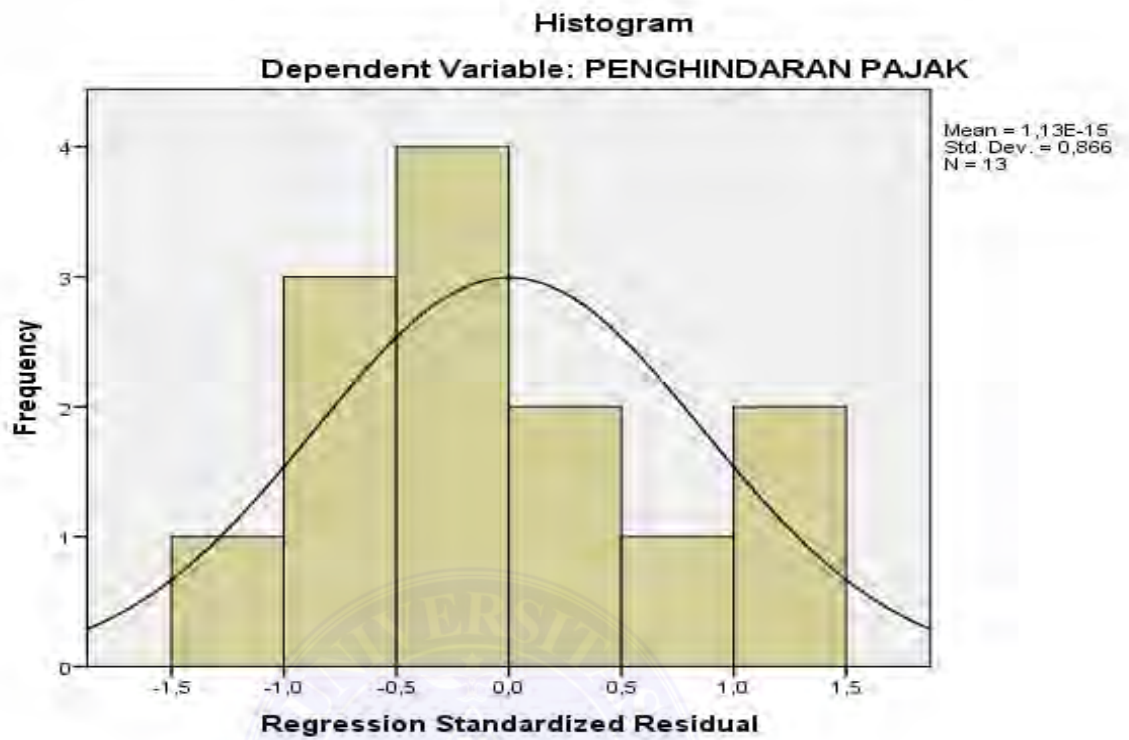
#### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		13
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,27068567
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,122
	Negative	-,109
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

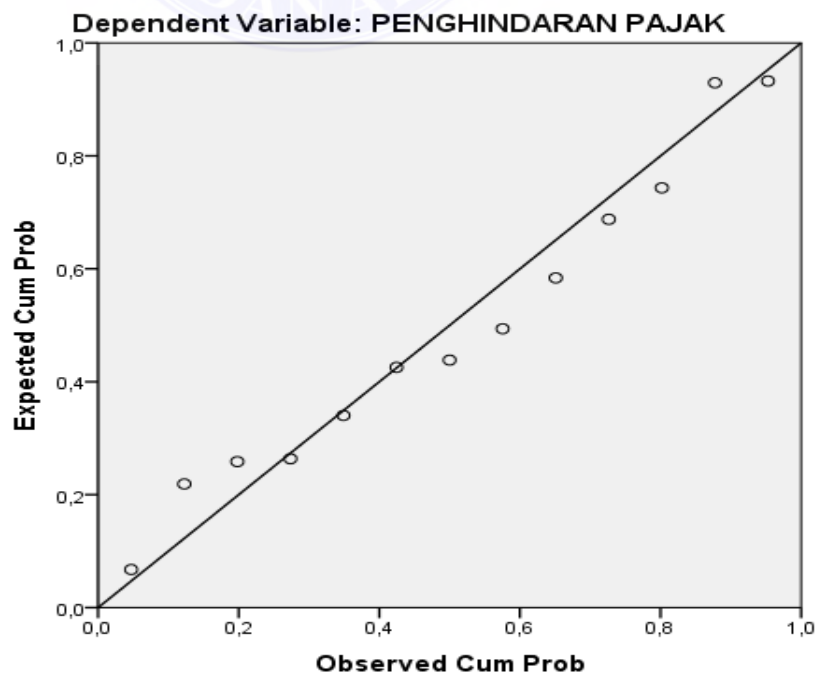
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.





**Grafik Histogram**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



## Grafik Normal Probability

### Hasil Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,405	,906		-1,552	,155		
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-,032	,047	-,121	-,679	,514	,917	1,091
KOMITE AUDIT	,334	,086	,713	3,874	,004	,865	1,156
DEWAN DIREKSI	-,056	,016	-,624	-3,533	,006	,940	1,064

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

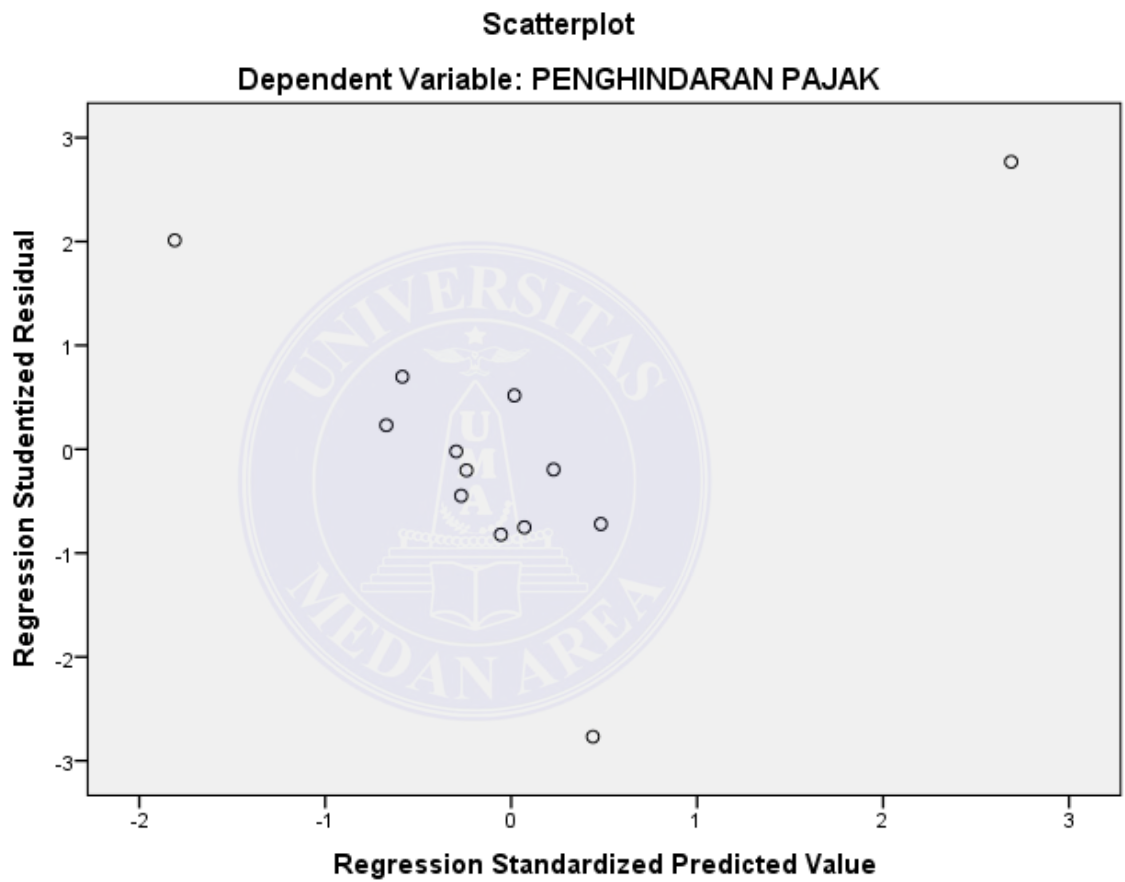
### Hasil Uji HETEROSKEDASTISITAS

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,777	,345		-2,251	,051
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	,002	,018	,024	,108	,916

KOMITE AUDIT	,092	,033	,637	2,801	,021
DEWAN DIREKSI	,009	,006	,319	1,465	,177

a. Dependent Variable: RES2



**Grafik Scatterplot**

**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
-------	---	----------	-------------------	----------------------------	---------------

1	,858 <sup>a</sup>	,736	,648	,312561	2,696
---	-------------------	------	------	---------	-------

a. Predictors: (Constant), DEWAN DIREKSI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT

b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,858 <sup>a</sup>	,736	,648	,312561

a. Predictors: (Constant), DEWAN DIREKSI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT

b. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

### Hasil Uji Parsial

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,405	,906		-1,552	,155
	KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL	-,032	,047	-,121	-,679	,514
	KOMITE AUDIT	,334	,086	,713	3,874	,004
	DEWAN DIREKSI	-,056	,016	-,624	-3,533	,006

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

## Hasil Uji Simultan

### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,455	3	,818	8,378	,006 <sup>b</sup>
	Residual	,879	9	,098		
	Total	3,335	12			

a. Dependent Variable: PENGHINDARAN PAJAK

b. Predictors: (Constant), DEWAN DIREKSI, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMITE AUDIT

